



RENJA PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 ini.

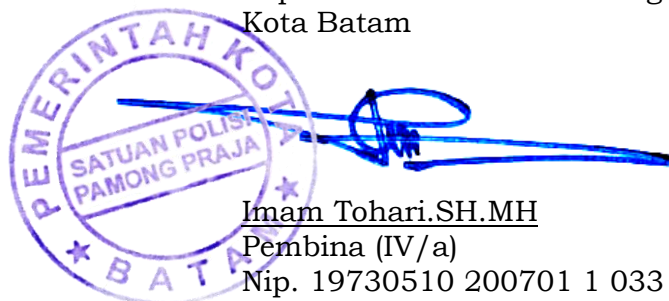
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Agustus 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam



Imam Tohari.SH.MH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	9
2.1 Evaluasi Terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Triwulan II Tahun 2023	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
3.2 Perubahan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023	26
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II	22
Tabel 3.1	Rincian Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	24
Tabel 3.2	Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	28
Tabel 3.3	Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2023 khususnya kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam.

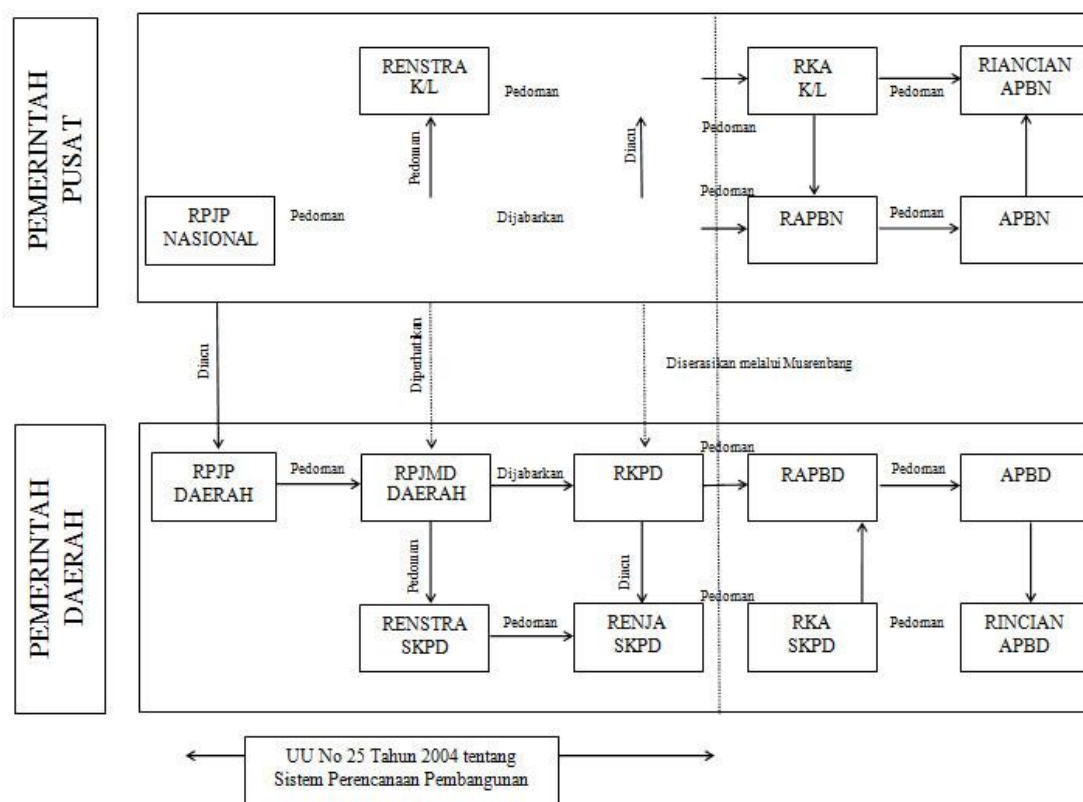
Selain berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dilakukan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2023.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

- t. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026
- u. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488);
- v. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 942).
- w. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 214 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026
- x. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD 2023 (Berita Daerah Nomor 11209);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran, menyingkronkan dan menyinergikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan Perubahan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Sataun Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai Triwulan II Tahun 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Memuat rincian program dan kegiatan dan pendanaan tahun 2023

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2. Perubahan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023
- 3.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Triwulan II Tahun 2023

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengaman dan pengawalan;
 - b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - c) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - d) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - e) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:
 - a) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Batam:
 - a) Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

Namun pada saat yang sama, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan pemutakhirannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan berubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diterbitkan dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2023, harus dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dan pencapaian Renstra:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM DAN PENCAPAIAN
RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023
KOTA BATAM

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)		
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100$ %	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100$	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	29.39	29.39%	100	48.24 %	48.24 %
1	05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat	100%	100%	100%	100%	100	29.39	29.39%	100	45.72 %	45.72 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)		
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$	
		Daerah yang terpenuhi											
1	05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/ Bulan	197 Orang	194 Orang	100	199	198	99.50%	199		
1	05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100	324	81	25.00%	324		
1	05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Layanan Administrasi Kepegawaian yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	0	0	100	0.00%	0 %
1	05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	0	0	2		
1	05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	35.4	35.40%	100	49.05 %	49.05 %
1	05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	0	0	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)		
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$	
1	05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6 Paket	100	7 Paket	2 Paket	28.57%	7		
1	05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	1 Paket	33.33%	3		
1	05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100%	2		
1	05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dolumen	100%	1		
1	05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	13 Laporan	11 Laporan	92,3	4 Laporan	1 Laporan	25%	4		
1	05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	68.09	68%	100	68.09 %	68.09 %
1	05..01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)		
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$	
		Lapangan yang Disediakan											
1	05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	5 Paket	-	-	-	4 Unit	-	-	4		
1	05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100	40 Unit	4 Unit	10%	40		
1	05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100	100	29.85	29.85%	100	52.64 %	52.64 %
1	05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	48 Laporan	12 Laporan	25%	48		
1	05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	72 Laporan	18 laporan	25%	72		
1	05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100	100	10	10%	100	19.61 %	19.61 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)	
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$
1	05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	4 Unit	2 Unit	50%	4		
1	05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	11 Unit	55%	20		
1	05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	35 Unit	100	45 Unit	16 Unit	35.56%	45		
1	05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%	1		
1	05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	100% 100%	100% 100%	100 100%	100 100%	8.74 8.74%	8.74% 8.74%	100	95.59 %	95.59 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)	
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$
		3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%					
1	05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani 2. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Persentase Polisi Pamongpraja yang memenuhi standar kualifikasi 4. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan terkena	100% 100% 100% 4 Orang	100% 100% 100% 100	100% 100% 100% 100	100	7.44	7.44%	100	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)	
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$
		dampak akibat penegakan perda dan perkada 5. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%									
1	05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	100 Kasus	24 Kasus	24 Kasus	100	100 Kasus	25 Kasus	25%	100	
1	05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	30 Kasus	21 Kasus	21 Kasus	100	37 Kasus	3 Kasus	3%	37	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)	
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$
1	05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1	05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	0	0%	6	
1	05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	26 Orang	18 Orang	18 Orang	100	35 Orang	0	0%	35	
1	05.02.2.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	1 Dokumen	-	-	-	-	0	0%	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)		
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$	
		Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kejahatan										
1	05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	15 Unit	-	-	-	-	0	0%	9		
1	05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	-	-	-	-	0	0%	-			
1	05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0	0%	1		
1	05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100	100	17.33	17.33	100	44.33 %	44.33 %
1	05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	0	0%	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)		
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$	
		Masyarakat/Pelaku Usaha											
1	05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100	34 Laporan	7Laporan	20.59%	34		
1	05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	6 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	6 Laporan	1Laporan	16.67%	6		
1	05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	8.72%	4,37%	4,37%	4.37%	5.34	5.34	100%	5.34	100 %	11.47%
1	05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	1 laporan	50%	2		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II Tahun 2023		Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan (2023)	
				Target (2022)	Realisasi (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6):(5)}{(5)} * 100\%$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{(12):(4)}{(4)} * 100\%$
		Penegakan Perda dan Perkada										

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang tertuang dalam DPA, 21 (dua puluh satu) sub kegiatan telah dilaksanakan, dan 2 sub kegiatan belum dilaksanakan, dengan capaian sebagaimana disajikan dalam tabel di atas.

Sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersebut belum dilaksanakan karena belum kelarnya Proses di e katalog, Sedangkan Sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sampai triwulan II (dua) ini tidak ada yg terkena dampak akibat sub kegiatan dari Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Penertiban) yang dilakukan di Kota Batam.

Selain itu, ada Sub kegiatan yang dirasionalisasi anggarannya, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Di Dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023 ada Sub Kegiatan Yang bertambah anggarannya diantaranya, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, serta Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II tahun 2023:

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
KOTA BATAM

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II tahun 2023:

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	TW II Tahun n	Tahun n	Tahun n+1		
				2021	2022	2023	2024	(2021)	(2022)	TW II 2023	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	TW II Tahun n	Tahun n	Tahun n+1		
				2021	2022	2023	2024	(2021)	(2022)	TW II 2023	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			ditegakkan											
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

3.1. Tujuan, dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah adalah **“Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Otimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		1.Otimalnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	80	82	84	86	88	90

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah							
		2. Menurunnya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
		3. Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%

3.2. Perubahan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023

Pada Perubahan Belanja APBD 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengalami penambahan dan pengurangan pagu. Diantara Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- g. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Sementara Sub Kegiatan yang mengalami penambahan karna kurangnya anggaran di APBD Murni diantaranya adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Retribusi Sampah)

Perubahan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2023
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	49,038,807,290	45,659,642,204	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	28,516,361,000	26,570,466,814	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/Bulan	189 Orang/Bulan	28,450,601,000	26,511,186,814	Karna adanya perpindahan Pegawai, dan sesuai efisiensi anggaran
		Pelaksanaan Penatausahaan dan	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	324 Dokumen	276 Dokumen	65,760,000	59,280,000	Adanya Sub Kegiatan yang

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					direncanakan tetapi tidak terealisasi
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	546,530,000	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	546,530,000	-	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	405,980,750	258,348,750	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,578,000	5,578,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	70,613,750	54.131.750	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	94,241,000	88.341.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30,808,000	29.897.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,400,000	5.400.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	3 Laporan	199,340,000	75.001.000	Efisiensi Anggaran
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	536,092,500	26.272.000	
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	244,808,000	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	4 Unit	291,284,500	26.272.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	18,630,435,040	18.494.674.640	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	38 Laporan	214,200,000	191.946.000	Adanya Rekening Telephone yang dibayarkan hanya 2 kali dalam 1 tahun

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 Laporan	72 Laporan	18,416,235,040	18.302.728.640	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	403,408,000	309,880,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2 Unit	80.760.000	80.760.000	Koreksi Jumlah Unit yang ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	11 Unit	139,270,000	139,270,000	Koreksi Jumlah Unit yang ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	35 Unit	25.770.000	22,270,000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 unit	157,608,000	67,580,000	Koreksi Jumlah Unit yang ada
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	1.Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat diselesaikan.	100%	100%	2,817,363,000	2.101.366.100	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KETERTIBAN UMUM	KETERTIBAN UMUM	<p>2.Persentase Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>3.Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan hokum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada</p>	100%	100%			

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<p>1.Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani</p> <p>2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan</p> <p>3.Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi</p> <p>4.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak</p> <p>5. Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada</p>	100%	100%	2,316,369,000	1,819,542,000	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	100 Kasus	1,076,423,000	1.053.987.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	37 Kasus	19 Kasus	411,970,000	291.380.000	Sesuai dengan Kegiatan yang ada
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	6 Dokumen	6 Dokumen	221,661,000	-	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35 Orang	15 Orang	201,995,000	103.205.000	Adanya pembatalan pelaksanaan Diklat Dasar Angkatan II oleh Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar Kemendagri
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	9 Unit	9 Unit	379,320,000	345.970.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25.000.000	
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	100%	100%	436,190,000	278.664.100	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	12 Laporan	36,480,000	-	
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34 Laporan	22 Laporan	257,990,000	159.170.000	Sesuai dengan Kegiatan yang ada
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	141,720,000	119.494.100	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023		RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	100%	100%	64,804,000	3.160.000	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	1 Laporan	64,804,000	3.160.000	Efisiensi Anggaran
TOTAL							51,856,170,290	47.761.008.304	

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (hasil inputan SIPD)

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	URUSAN PEEMRINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												50.688.360.867	47.761.008.304				57.744.617.319	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											48.516.438.867	45.659.642.204			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	54.645.518.019
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %						29.248.126.277	26.570.466.814			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	31.367.997.100
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Batam, Sagulung kota			199 Orang/bulan	199 Orang/bulan	100 %	100 %		29.185.846.277	26.511.186.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	31.295.661.100
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V		Kota Batam, Sagulung kota			276 Dokumen	276 Dokumen	100 %	100 %		62.280.000	59.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif	100%	72.336.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian kinerja			Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah	Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			erifikasi Keuangan SKPD														ikiasi Keuangan SKPD		
1.05.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 %	100 %						0	0			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	601.183.000
1.05.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Batam, Sagulung kota			2 Paket	2 Paket	100 %	100 %		0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	601.183.000
1.05.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %						329.038.750	258.348.750			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	446.578.825
1.05.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			1 Paket	1 Paket	100 %	100 %		5.578.000	5.578.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	6.135.800
1.05.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			7 Paket	7 Paket	100 %	100 %		54.131.750	54.131.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	77.675.125
1.05.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			3 Paket	3 Paket	100 %	100 %		88.341.000	88.341.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	103.665.100
1.05.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			2 Paket	2 Paket	100 %	100 %		29.897.000	29.897.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	33.888.800
1.05.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan		Kota Batam, Sagulung kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %		5.400.000	5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100%	5.940.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian kinerja			Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Perundang-undangan yang Disediakan														undangan yang Disediakan		
1.05.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Sagulung kota			4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	145.691.000	75.001.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	219.274.000	
1.05.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	100 %					37.802.000	26.272.000			Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.292.531.750	
1.05.0 1.2.07. 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	702.830.000	
1.05.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	269.288.800	
1.05.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	37.802.000	26.272.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	320.412.950	
1.05.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	100 %					18.592.171.840	18.494.674.640			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	20.493.478.544	
1.05.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air		Kota Batam, Sagulung kota			38 Laporan	38 Laporan	100 %	100 %	177.000.000	191.946.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	235.620.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian kinerja			Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah	Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dan Listrik yang Disediakan													yang Disediakan		
1.05.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung kota			72 Laporan	72 Laporan	100 %	100 %	18.415.171.840	18.302.728.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	20.257.858.544
1.05.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100 %	100 %					309.300.000	309.880.000			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	443.748.800
1.05.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Batam, Sagulung kota			2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	80.760.000	80.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	88.836.000
1.05.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Sagulung kota			11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	139.270.000	139.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	153.197.000
1.05.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Batam, Sagulung kota			35 Unit	35 Unit	100 %	100 %	22.270.000	22.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	28.347.000
1.05.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		Kota Batam, Sagulung kota			2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	67.000.000	67.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	100%	173.368.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dipelihara/Rehabilitasi																
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada 3. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada				100 %	100 %										1.Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada 3. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	100%	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani 2. Persentase satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Persentase polisi pamongpraja yang memenuhi standar kualifikasi 4. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan gangguan trantibum akibat penegakan		100%	100%					1.874.397.000	1.819.542.000			1.Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani 2. Persentase satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Persentase polisi pamongpraja yang memenuhi standar kualifikasi 4. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan gangguan trantibum akibat penegakan	100%	2.548.005.900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Tolok Ukur	Target			Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada 5. Persentase jenis sapras trantibum yang terpenuhi kebutuhan		100%	100%										hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada 5. Persentase jenis sapras trantibum yang terpenuhi kebutuhan	100%	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan		Kota batam, semua kecamatan, semua keluarahan	100 %	100 %	100 Kasus	100 Kasus	100 %	100 %	1.053.987.000	1.053.987.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	100%	1.184.065.300	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan		Kota batam, semua kecamatan, semua keluarahan	100 %	100 %	19 Kasus	19 Kasus	100%	100%	291.380.000	291.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	100%	453.167.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						7	8	9	10	11	12			13	14			15
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		Kota Batam, Sagulung kota	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	100%	0
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum		Kota Batam, Sagulung kota			6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	100%	243.827.100
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		Kota Batam, Sagulung kota			30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	158.060.000	103.205.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	222.194.500
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik		Kota Batam, Sagulung kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	100%	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			pengecahan kejahatan																	
1.05.0 2.2.01. 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia		Kota Batam, Sagulung kota			9 Unit	9 Unit	100 %	100 %	345.970.000	345.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	100%	417.252.000		
1.05.0 2.2.01. 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan		Kota Batam, Sagulung kota			0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %			Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	100%			
1.05.0 2.2.01. 09	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah laporan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani		Kota Batam, Sagulung kota			1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	25.000.000	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah laporan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	100%	27.500.000		
1.05.0 2.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti		100 %	100 %					272.990.000	278.664.100			Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	479.809.000		
1.05.0 2.2.02. 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat /pelaku usaha		Kota Batam, Sagulung kota			12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ke kelompok masyarakat/pe laku usaha	100%	40.128.000		
1.05.0 2.2.02. 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan		Kota Batam, Sagulung kota			22 Laporan	22 Laporan	100 %	100 %	159.170.000	159.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan	100%	283.789.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota														terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
1.05.0 2.2.02. 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP		Kota Batam, Sagulung kota			6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	113.820.000	119.494.100	DBH Cukai Hasil Tembau (CHT) Pendapatan bagi hasil Pajak Rokok Pencegakan Disiplin		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	100%	155.892.000	
1.05.0 2.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Rasio PPNS Satpol PP		100%	100%					24.535.000	3.160.000			Rasio PPNS Satpol PP	100%	71.284.400	
1.05.0 2.2.03. 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penguatan Perda dan Perkada		Kota Batam, Sagulung kota			1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	24.535.000	3.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100%	71.284.400	
TOTAL												50.688.360.867	47.761.008.304					57.744.617.319	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat RKA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.